

Volume 15, No. 1 April 2024

pISSN: 1978-3469  
eISSN: 2657-1927



# LUMEN VERITATIS

Jurnal Filsafat dan Teologi

**ALLAH DALAM PERSPEKTIF THOMAS AQUINAS: MENDALAMI  
ESENSI-EKSISTENSI MELALUI 'ESSE SEBAGAI IPSUM ESSE  
SUBSISTENS'**

Heribertus Ama Bugis, FX. Eko Armada Riyanto, Wenseslaus  
Jugan

**FROM HUSSERL TO MERLEAU-PONTY: TRACING THE ARC OF  
PHENOMENOLOGY**

Iqbal Hussain Alamyar

**MEMBONGKAR ONTO-TAKSONOMI: TAWARAN GRAHAM  
HARMAN BAGI ALAM**

Yohanes Theo

**NIETZSCHE UNTUK PARA TENAGA KERJA INDONESIA**

Yohanes Vianey F. Akoit

**KEAKRABAN RELASI NIETZSCHE DENGAN PAULUS**

Supeno Lembang

**KEMATIAN DAN KEBANGKITAN JURNALISME: SUATU  
TINJAUAN MENURUT KONSEP MEDIA MASSA JÜRGEN  
HABERMAS DAN TRADISI JURNALISME SANDRA L. BORDEN**

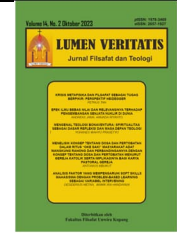
Michael Carlos Kodoati

**THE IMPLEMENTATION OF TOURISM AXIOLOGICAL  
DIMENSION FOR WOMEN SURVIVORS:**

**A PHILOSOPHICAL EXAMINATION**

Marius Yosef Seran, Reynaldo A. Siagian, Ni Wayan Noviana  
Safitri, I Nengah Dasi Astawa

Diterbitkan oleh  
Fakultas Filsafat Unwira Kupang



## KEMATIAN DAN KEBANGKITAN JURNALISME: SUATU TINJAUAN MENURUT KONSEP MEDIA MASSA JÜRGEN HABERMAS DAN TRADISI JURNALISME SANDRA L. BORDEN

**Michael Carlos Kodoati**

Fakultas Komunikasi, Universitas Mpu Tantular Jakarta

Surel: [michaelcarloskodoati@gmail.com](mailto:michaelcarloskodoati@gmail.com)

Received: January, 2 2024

Accepted: April, 20 2024

Published: April, 30 2024

### Abstrak

Jika diterawang dari sudut pandang Jürgen Habermas dan Sandra L. Borden, jurnalisme itu telah mati. Ketika jurnalisme berisi keberpihakan pada uang dan tidak lagi sebagai penyokong demokrasi, dalam arti itu ia mati. Artikel ini hendak mengungkapkan bahwa jurnalisme yang mati itu perlu merefleksikan diri, berupaya bangkit, karena bagaimanapun ia pernah lahir demi hidupnya demokrasi. Jurnalisme bagi Habermas, mati karena kinerjanya yang partisan dan kapitalis memperlihatkan eksistensinya sebagai entitas yang sangat tidak demokratis. Jurnalisme bagi Borden, mati karena beraktivitas dalam gerak-gerak yang tidak sesuai lagi dengan tradisiewartakan kebenaran. Dibalik kritik Habermas dan Borden perlu ada jalan keluar untuk menyelamatkan jurnalisme. Demokrasi tanpa jurnalisme akan jatuh pada hilangnya fungsi control pers. Tidak ada watchdog yang memelihara sehatnya demokrasi. Melalui metode analisis sumber-sumber pustaka, penulis ingin menegaskan urgensi perbaikan diri pers dan jurnalisme itu. Bagi penulis, perlu ada saluran yang tepat dalam kerangka demokrasi untuk memastikan setiap kebenaran dan opini publik pada akhirnya bermuara pada sehatnya pembangunan demokrasi.

**Kata Kunci:** Media Massa, Jurnalisme Demokratis, Tradisi Jurnalisme, Jürgen Habermas, Sandra L. Borden

### Abstract

*Viewed from the perspectives of Jürgen Habermas and Sandra L. Borden, journalism is considered dead. When journalism prioritizes profit over its role as a supporter of democracy, in that sense, it is dead. This article aims to reveal that the dead journalism needs introspection and efforts to revive itself, as it was born to serve democracy. According to Habermas, journalism is dead because its partisan and capitalist performance demonstrates its existence as a highly undemocratic entity. For Borden, journalism is dead because it engages in activities that no longer align with the tradition of truth-telling. Behind the criticisms of Habermas and Borden, there needs to be a way out to save journalism. Democracy without journalism will lead to the loss of the press's control function. There will be no watchdog to safeguard the health of democracy. Through the method of analyzing literary sources, the author aims to emphasize the urgency of improving the press and journalism. For the author, there needs to be an appropriate channel within the framework of democracy to ensure that every truth and public opinion ultimately contribute to the health of democratic development.*

**Keywords:** Mass Media, Democratic Journalism, Journalism Tradition, Jürgen Habermas, Sandra L. Borden



## PENDAHULUAN

Jurnalisme, pers dan media massa, tiga entitas ini, dalam tulisan ini akan dilihat sama, secara umum sebagai suatu aktivitas mengelola pemberitaan yang menginformasi masyarakat dalam ruang-ruang publik.<sup>1</sup> Tugas ini sangat mulia. Sebagaimana dicatat oleh Jürgen Habermas dalam habilitasinya, bahwa dimensi kritis masyarakat warga di ruang-ruang publik pada masa kelahiran demokrasi, tidak lain karena dipicu oleh tumbuhnya aktivitas pemberitaan. Dalam konteks demokrasi modern, jurnalisme, pers dan media massa, dikenal sebagai pilar keempat yang melengkapi tiga lainnya: legislatif, eksekutif, yudikatif, yang pernah dikonsepsikan oleh filsuf Prancis, Montesquieu.<sup>2</sup>

Sejak melakukan penelitian mengenai kritik Habermas atas media massa, sekitar tahun 2022 lalu,<sup>3</sup> ada suatu pesimisme yang muncul, bahwa masa depan media massa sebagai suatu saluran kritis dalam ruang-ruang publik tidak akan terlalu baik, jika mengacu pada tuntutan independensi yang tampak sulit untuk diwujudkan dalam era yang didominasi oleh sistem<sup>4</sup> yang terlalu kuat. Kekhawatiran ini cukup beralasan. Betapa tidak, kritik Habermas menunjukkan seakan-akan tidak ada lagi suatu saluran kritis demokratis ketika independensi media massa dalam definisi Habermas terlalu sulit untuk diwujudkan. Padahal, dalam kehidupan demokrasi modern, sebagaimana disebutkan oleh Sandra L. Borden, media massa dalam peran sebagai pers dalam praktik-praktik jurnalismenya memiliki suatu idealisme, bahwa kebenaran dapat ditegakkan tanpa pengaruh uang dan suasana ketidakbebasan (tekanan dan intimidasi

---

<sup>1</sup> Jurnalisme, media massa dan pers merupakan tiga entitas berbeda dalam pemaknaan proses dan kelembagaan. Jurnalisme merupakan suatu idealisme dalam praktik-praktik jurnalistik; praktik penulisan berita, peristiwa dan berita baik dalam bentuk tulisan, gambar, video maupun suara. Sementara media massa bersifat kelembagaan; suatu saluran yang menjadi medium bagi komunikasi masyarakat warga di ruang-ruang publik, di mana di dalamnya praktik-praktik jurnalistik itu diakomodir. Sementara pers, sebagaimana dalam Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, trans. Thomas Burger & Frederick Lawrance (Cambridge, USA: The MIT Press, 1989), 24., menggambarkan suatu lembaga di mana penalaran kritis publik terhadap kebijakan negara terjadi. Otoritas publik mulai memaknai kelompok masyarakat sebagai publik kritis, dalam maknanya yang spesifik: “pers.” Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan istilah “jurnalisme” dibandingkan “pers” atau “media massa” di banyak tempat. Penggunaan ini hanya untuk efisiensi penulisan. Jika di beberapa tempat masih ada penggunaan “media massa” atau “pers” itu karena teks kutipan dari pemikir yang penulis gunakan dalam tulisan ini, di mana mereka menyebut istilah itu dalam tulisan mereka.

<sup>2</sup> John Merrill, Peter Gade, and Frederick Blevens, *Twilight of Press Freedom: The Rise of People's Journalism* (Mahwah, N.J.: Erlbaum, L, 2001), 195. <http://site.ebrary.com/id/10258360>.

<sup>3</sup> Michael Carlos Kodoati, “Kritik Jürgen Habermas Atas Media Massa: Prinsip, Debat, Dan Relevansi” (Tesis Magister, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2022. [https://17813 ...](https://17813...), 2022).

<sup>4</sup> Getrund Koch, mengenai sistem ini mengandaikan suatu dunia kontemporer di mana kapitalisme lanjut telah berkembang menjadi tanah yang subur bagi pergerakan sistem di dalam dunia. Sistem itu sendiri tidak lain ialah kapitalisme dan kekuasaan politik. Michael Carlos Kodoati, *Kritik Atas Media Massa: Menjadi Media Massa Demokratis Menurut Jürgen Habermas* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), 110, 11, 15.; Gertrund Koch, “Mass Culture and Cultural Criticism,” in *The Habermas Handbook*, ed. Hauke Brunkhorst, Regina Kreide, and Cristina Lafont (New York: Columbia University Press, 2009), 592.

kuasa politik).<sup>5</sup> Menurut penulis, Habermas maupun Borden memiliki catatan yang mirip mengenai peran jurnalisme dalam demokrasi: suatu idealisme yang mengungkapkan kebenaran. Tetapi sejak tumbuhnya industrialisasi, Habermas mengatakan bahwa dimensi kritis itu telah mati,<sup>6</sup> Borden pun mengatakan bahwa teknologi baru membuat jurnalisme berserakan tidak teratur di mana-mana dan melupakan tradisi demokratisnya.<sup>7</sup>

Kritik Habermas dan Borden terhadap media massa dan jurnalisme dibangun di atas landasan berpikir yang kokoh. Tulisan Habermas *Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Have an Epistemic Dimension?* Sesungguhnya merupakan catatan pendek berisi kritiknya atas media massa, namun dibangun berdasarkan pemikiran yang urut dari buku-buku besar yang pernah ia tulis: konsep ruang publik, teori diskursus, dan konsep demokrasi deliberatif. Sementara Borden melalui bukunya *Journalism as Practice: MacIntyre, Virtue Ethics and the Press* dengan sangat cermat disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif mengenai tanggung jawab epistemik jurnalistik yang dilihatnya sebagai suatu keutamaan moral sebagaimana pernah dipikirkan oleh Alasdair MacIntyre.

Pusat kritik Habermas terhadap media massa berbunyi: “Media massa bukanlah gambaran yang diinginkan mengenai kemungkinan deliberatif dalam demokrasi, karena bentuk komunikasi pada media massa tidak sesuai dengan gambaran komunikasi tatap muka yang spontan dan timbal balik. Namun demikian, media massa dapat menjadi deliberatif jika memenuhi dua syarat, yaitu (1) memiliki sistem regulasi diri berdasarkan hukum yang menciptakan independensi media massa dan, (2) menghasilkan hubungan umpan balik antara diskursus elit yang terinformasi dan masyarakat warga yang responsif di antara pembaca, pendengar dan pemirsa.”<sup>8</sup> Sementara Sandra L. Borden mengkritik jurnalisme, bahwa setelah perkembangan teknologi elektronik jurnalisme telah mengubah wajahnya dari “tradisi jurnalisme” menjadi sekedar televisi yang menghadirkan tayangan hiburan dan jurnalisme yang mendramatisasi berita dengan gambar dan suara dan suatu jurnalisme yang hanya menyaksikan berita, tidak “menemukan” berita itu dan menjadikannya mendalam.<sup>9</sup> Bagi Borden, jurnalisme, apapun itu, dapat ada hanya karena alasan sebagai penyokong demokrasi. Jurnalisme merupakan sebuah tradisi yang kuat, asal mengikuti tradisi demokrasi, kewarganegaraan, pengetahuan, dan kebebasan.<sup>10</sup>

Dalam teori diskursus, secara ideal Habermas menginginkan bahwa suatu komunikasi terjadi secara timbal balik. Dalam arti itu, suatu tindakan komunikatif mengandaikan adanya interaksi simbolik yang dikendalikan oleh norma-norma kesepakatan yang mengikat, menentukan harapan-harapan timbal balik yang harus

---

<sup>5</sup> Michael Carlos Kodoati, and Serepina Tiur Maida, "Defisit Kritis Media Massa: Menimbang Kebutuhan Akan Regulasi Diri Media Massa Berdasarkan Pemikiran Jürgen Habermas," *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah* 11, no. 1 (2023): 29.

<sup>6</sup> Habermas, 184, 89.

<sup>7</sup> Sandra L. Borden, *Journalism as Practice: Macintyre, Virtue Ethics and the Press* (2013), 32.

<sup>8</sup> Jürgen Habermas, "Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Have an Epistemic Dimension?," in *Europe: The Faltering Project* (Cambridge, UK: Polity Press, 2009), 139.

<sup>9</sup> Borden, 32.

<sup>10</sup> Borden, 32.

dimengerti dan diketahui setidaknya oleh dua subjek yang bertindak.<sup>11</sup> Itulah rasionalitas komunikatif.<sup>12</sup> Merujuk pada ideal Habermas tersebut, independensi media massa terlihat sulit untuk diwujudkan. Bukan hanya karena kuasa kapitalis dan politik merupakan sistem yang terlalu kuat untuk dihadapi, tetapi perkembangan teknologi yang masif juga menjadi tantangan semakin sulitnya ideal komunikasi Habermas menjadi kenyataan dalam cara-cara media massa beroperasi. Lahirnya internet pada tahun 1969 telah membawa perubahan yang besar dalam demokrasi modern. Kehidupan manusia modern juga terbawa arus digitalisasi. Semua berubah menjadi serba digital, termasuk cara-cara manusia mengakses berita di media massa. Perubahan ini mendorong industri media massa untuk mengubah pengelolaannya menjadi media massa digital, karena dengan tidak berubah, media tersebut tidak akan diakses oleh publik yang telah berubah. Digitalisasi juga mendorong keanekaragaman kanal. Internet telah memudahkan apa saja, termasuk kemudahan membentuk kanal. Tetapi ini kemudian menjadi masalah. Jika Habermas pada habilitasinya menyebut bahwa munculnya mesin cetak kemudian meningkatkan aktivitas pencetakan surat kabar yang pada akhirnya melahirkan komersialisasi media, Borden secara hampir mirip melihat bahwa perkembangan teknologi telah memunculkan elektronik yang berserakan dan merusak tradisi jurnalisme cetak yang sebelumnya dikenal mendalam.<sup>13</sup> Kecenderungan tidak mendalam dalam jurnalisme baru yang dikembangkan media elektronik dan internet menurut Borden merupakan efek dari “mengejar pemasaran media” yang ujung-ujungnya ialah pencapaian target kapital.<sup>14</sup> Berdasarkan Habermas dan Borden, penulis pada posisi melihat bahwa jurnalisme sesungguhnya telah mati.

Kematian jurnalisme yang penulis identifikasi di sini mengikuti Habermas yang terlalu sulit menerapkan solusi atas pernyataannya mengenai “tidak cocoknya” media massa bagi demokrasi,<sup>15</sup> dan tindakan Borden yang secara praktis meninggalkan jurnalisme, berhenti dari pekerjaannya sebagai jurnalis, dan mulai mengkritik jurnalisme.<sup>16</sup> Tetapi kematian jurnalisme dalam tulisan penulis ini juga tidak jauh dari pemahaman populer akhir-akhir ini setelah kemunculan *The Death of Expertise* menurut Tom Nichols.<sup>17</sup> Nichols mengumandangkan matinya kepakaran, salah satunya disebabkan karena era informasi yang dipenuhi dengan kepentingan jurnalisme *view*. Kanal yang meliput dan menulis berita tidak lagi berada dalam tujuan mulia tradisi jurnalisme sebagaimana diharapkan Habermas dan Borden, tetapi telah menjadi kanal yang mengejar popularitas, dan popularitas itu diukur melalui banyaknya pengunjung yang oleh algoritma digital dapat dikonversi menjadi uang. “Matinya kepakaran para

---

<sup>11</sup> David West, *Continental Philosophy: An Introduction* (Cambridge: Blackwell Publishers, 1996), 68.

<sup>12</sup> Rasionalitas komunikatif mengandaikan tindakan lain yaitu rasionalitas sasaran atau tindakan strategis. Tindakan strategis dilakukan bukan untuk mencapai saling pengertian, melainkan agar lawan bicara melakukan apa yang pihak lain harapkan. Tindakan strategis mengandung dominasi atau kendali atas orang lain, monologis yang sarat bujukan, rekayasa, manipulasi, penekanan dan paksaan. Kodoati, *Kritik Atas Media Massa: Menjadi Media Massa Demokratis Menurut Jürgen Habermas*, 58.

<sup>13</sup> Borden, 32.

<sup>14</sup> Borden, xi.

<sup>15</sup> Kodoati, 65.

<sup>16</sup> Borden, xi.

<sup>17</sup> Tom Nichols, *The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why It Matters* (New York, N.Y: Oxford University Press, 2019).

jurnalis” sebagaimana diungkap Nichols sebenarnya berada dalam motif yang sama dengan Habermas dan Borden. Kekhawatiran yang penulis ungkapkan di awal semakin meresahkan ketika gemas kematian jurnalisme ini menjadi perbincangan populer di Amerika akhir-akhir ini. Jeffrey Dvorkin menggemakan kematian jurnalisme melalui tulisannya berjudul *Why Click-Bait Will Be the Death of Journalism*.<sup>18</sup> Algoritma digital menjadi ukuran kapital yang lagi-lagi menjadi alasan bagi matinya jurnalisme. Media massa dipaksa untuk meninggalkan tulisan-tulisan kering yang tidak mengundang minat pembaca untuk meng-*klik* dan menambah angka pembaca. Hal ini mirip dengan curahan hati Habermas dalam tulisan ringannya mengenai surat kabar kesayangannya *Süddeutsche Zeitung*. Habermas bercerita bahwa surat kabar kesayangannya itu menghadapi masa depan ekonomi yang tidak pasti karena mayoritas pemilik ingin menjual sahamnya. Alasannya, tulisan-tulisannya terlalu serius dan kering. Tidak mendatangkan iklan. *Süddeutsche Zeitung* sebagai media massa kiri liberal telah sulit mendanai pembayaran terhadap tenaga korespondensinya karena runtuhnya pasar periklanan media itu pada awal tahun 2002.<sup>19</sup> Bagi penulis, kematian jurnalisme memang mengkhawatirkan. Sebagaimana argumen Habermas dan Borden, juga bagaimana Nichols dan Dvorkin menggaungkan kuatnya arah itu, tetapi kematian jurnalisme ini justru memunculkan pertanyaan penting yang ingin penulis jawab dalam tulisan ini: jika tanpa jurnalisme, lalu apa saluran kritis yang tersedia bagi komunikasi masyarakat warga di ruang-ruang publik?

Tulisan ini sebenarnya ingin menemukan jalan keluar dari identifikasi bersama Habermas dan Borden mengenai matinya jurnalisme. Saat ini, ketika kebohongan dapat disamarkan sebagai suatu kebenaran dan massa cenderung memilih media sosial sebagai sarannya menentukan kebenaran, peran jurnalisme sebagaimana diharapkan Habermas dan Borden sesungguhnya diperlukan. Apa jadinya demokrasi tanpa *watchdog*? Tulisan ini tidak hanya akan menguraikan inti kritik Habermas dan Borden atas perilaku jurnalisme yang mengkhawatirkan bagi demokrasi, tetapi juga akan melihat lebih rinci dasar pemikiran dua tokoh ini. Karena pada akhirnya penulis bertanya mengenai siapa anjing penggonggong bagi lancarnya demokrasi jika jurnalisme mati, maka tulisan ini pada akhirnya akan menguraikan bagaimana jurnalisme tetap eksis meski dengan solusi satu-satunya ialah mempertimbangkan syarat-syarat ketat yang diajukan Habermas dan Borden itu sendiri. Habermas dan Borden melayangkan kritik, tetapi dibalik kritik mereka mengandung solusi perbaikan yang dapat menjadi masa depan jurnalisme dalam demokrasi modern. Habermas dan Borden sama-sama menentukan bahwa jurnalisme perlu berada dalam jalur demokratis, jika ia: independen dan tidak terikat pada kebutuhan mengenai uang dan kuasa politik.

Bagi penulis, perlu ada saluran yang tepat dalam kerangka demokrasi untuk memastikan setiap kebenaran dan opini publik pada akhirnya bermuara pada sehatnya

---

<sup>18</sup> Jeffrey Dvorkin, "Column: Why Click-Bait Will Be the Death of Journalism," (2016), <https://www.pbs.org/newshour/economy/what-you-dont-know-about-click-bait-journalism-could-kill-you>.

<sup>19</sup> Habermas, "Media, Markets and Consumers: The Quality Press as the Backbone of the Political Public Sphere," in *Europe: The Faltering Project*, 131.

pembangunan demokrasi. Demokrasi adalah kehendak rakyat, tetapi juga bukan kehendak liar dari masing-masing subjek. Demokrasi secara radikal ialah memastikan kehidupan bersama dibicarakan secara seksama dan bermuara pada regulasi yang mengatur kehidupan bersama. Kebebasan dijamin seluas-luasnya, tetapi diatur dengan regulasi yang tidak diskriminatif. Keragaman kanal, media sosial dan beragam komunitas yang dapat menciptakan opini publik, perlu, tetapi diatur dalam regulasi demokratis. Hal ini signifikan, karena kebebasan tanpa regulasi mengarahkan demokrasi kepada banalitas. Dalam konteks komunikasi demokratis, banalitas mengandaikan opini publik secara serampangan ditampilkan, itu diterima dan dianggap wajar, tetapi dangkal, tidak dalam pemaknaan mendalam, namun terlihat pantas untuk terus praktikkan.

## **METODE PENELITIAN**

Melalui metode analisis sumber-sumber pustaka, penulis ingin menegaskan urgensi perbaikan diri jurnalisisme, berangkat dari kritik Habermas dan Borden. Sumber primer yang dipakai adalah karya Habermas berjudul *Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Have an Epistemic Dimension?* dan karya Borden berjudul *Journalism as Practice: MacIntyre, Virtue Ethics and the Press*. Karena *Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Have an Epistemic Dimension?* dibangun Habermas berdasarkan pemikiran-pemikiran besarnya pada konsep ruang publik, teori diskursus, dan konsep demokrasi deliberatif, maka buku-buku Habermas seputar itu juga menjadi sumber primer dalam penulisan ini. Agar kemudian tidak terkesan deskriptif hanya mengenai pemikiran Habermas dan Borden, beberapa sumber buku dan artikel yang relevan penulis gunakan dalam diskusi kritis di setiap bagian tulisan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jurnalisisme Demokratis dan Industrialisasi**

Habermas, filsuf Jerman, salah satu filsuf kontemporer terbesar yang pengaruhnya sangat luas. Karya-karyanya berpengaruh dalam berbagai bidang ilmu sosial dan kemanusiaan yang berbeda-beda. Termasuk studi media, jurnalisisme dan komunikasi.<sup>20</sup> Keluasan pemikiran ini dikarenakan Habermas merupakan seorang pemikir interdisipliner dan ia tidak pernah berhenti pada satu domain keilmuan yang sempit. Habermas melampaui batas-batas disiplin suatu ilmu dengan mendalami filsafat, sains, sejarah, psikologi, politik, agama, sastra dan seni di Göttingen, Zürich dan Bonn. Perjalanan intelektualnya mengagumkan. Ia menyumbang interpretasi originalnya atas sejarah filsafat sejak Descartes, mengembangkan suatu pemikiran baru yang melampaui bahasa dan komunikasi, pengetahuan dan rasio, etika dan hukum, sains dan teknologi, ekonomi dan demokrasi, juga perkembangan kognitif individu dan evolusi sosial.<sup>21</sup> Habermas adalah pembela utama keyakinan rasio pencerahan yang diyakininya sebagai pembimbing moralitas dan politik. Ia duduk dengan setia pada

---

<sup>20</sup> James Gordon Finlayson, *Habermas: A Very Short Introduction* (Oxford University Press, 24 Sep 2013, 2005), xi. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780192840950.001.0001>.

<sup>21</sup> Gusti A. B. Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 44.



keyakinan bahwa rasio merupakan jantung komunikasi manusia, yang baginya merupakan mesin utama emansipasi manusia.<sup>22</sup>

Borden adalah seorang pemikir di bidang komunikasi dan studi jurnalisme Amerika yang meninggalkan dunia praktis jurnalistik. Ia merupakan Direktur *Center for the Study of Ethics in Society* di Western Michigan University. Ia merupakan pemikir besar dalam bidang etika media dan jurnalisme berangkat dari pengalamannya sebagai jurnalis tetapi juga mendalami keilmuan dalam komunikasi massa dan jurnalisme. Borden mengajar kritik media, etika komunikasi, dan kebebasan berbicara. Borden memiliki kontribusi yang signifikan dalam literatur akademis, termasuk publikasi dalam buku dan jurnal ilmiah seperti *The Handbook of Mass Media Ethics*, *Journal of Mass Media Ethics*, *Journalism: Theory, Practice, and Criticism*, *Communication Monographs*, dan *Communication Theory*. Dalam dunia filsafat, salah satu bukunya, *Journalism as Practice: MacIntyre, Virtue Ethics and the Press*, yang penulis gunakan sebagai sumber primer penulisan ini, meraih *Clifford G. Christians Ethics Research Award* tahun 2008 dan penghargaan buku teratas dalam etika terapan dari *National Communication Association* tahun 2008. Buku ini populer dalam studi etika media tetapi juga diperhitungkan dalam studi filsafat praktis karena mendasarkan diri pada etika keutamaan Alasdair MacIntyre.<sup>23</sup>

Habermas dan Borden sama-sama mengkritik media massa dan jurnalisme, menerangkan suatu arah yang suram bagi posisi saluran kritik demokratis tersebut. Bagi Habermas, media massa dalam sejarahnya telah menjadi pemantik budaya kritik yang kemudian melahirkan perlawanan publik borjuis kepada feodalisme yang berakhir pada munculnya demokrasi. Tetapi menurut Habermas, si pemicu budaya kritik itu kemudian berubah, dan tidak dapat diharapkan, setelah adanya industrialisasi media massa yang kemudian mematikan dimensi kritik publik. Borden sendiri memiliki pendapat yang menurut penulis kurang lebih sama dengan Habermas. Bagi Borden, sejak kemunculan mesin cetak, jurnalisme memulai tradisinya dengan pengungkapan kebenaran secara mendalam dalam tulisan-tulisan di atas kertas. Terlepas dari kertas-kertas itu kemudian dikenal sebagai surat kabar yang tentunya komersial, namun jurnalisme cetak telah menjadi tradisi yang begitu kuat dan diyakini sebagai tradisi jurnalisme yang berani, mendalam dan tidak sepenggal-sepenggal dalam menampilkan pemberitaan publik. Sebagai seorang jurnalis, Borden sangat meyakini kedalaman jurnalisme cetak, dan menganggap itu sebagai jurnalisme sesungguhnya hingga kemudian teknologi baru melahirkan elektronik. Pada fase kelahiran elektronik itu, Borden mulai ragu dan meninggalkan dunia jurnalisme. Borden menyebut elektronik pada media massa telah menyebabkan berserakannya berita yang tidak mendalam, karena berita (televisi) misalnya hanyalah tontonan yang tidak mendalami berita sesungguhnya. Habermas dan Borden sama-sama pada posisi: awalnya percaya pada posisi demokratis jurnalisme dan media, tetapi lalu ragu dan menganggap media dan jurnalisme tidak lagi sebagai entitas demokratis. Penulis

---

<sup>22</sup> Menoh, 45.

<sup>23</sup> Western Michigan University, "Biografi Sandra L. Borden," 2023, <https://wmich.edu/communication/directory/borden>.



melihat ini sebagai “kematian jurnalisme,” bahwa mengenai terang dalam uraian Habermas maupun Borden sendiri dalam pemikiran-pemikiran mereka berikut.

Sejak habilitasinya, Habermas mengidentifikasi kemunculan media massa sebagai pemantik atau pemicu budaya kritik publik borjuis. Bagi Habermas, lahirnya budaya kritik publik borjuis merupakan awal dari bangkitnya kesadaran yang melawan feodalisme yang pada akhirnya melahirkan demokrasi. Embrio perkembangan kesadaran kritis publik yang memunculkan perlawanan itu, sudah di mulai sejak abad ke-13. Embrio itu ialah kemunculan kapitalisme yang membentuk tatanan-tatanan sosial baru melalui kegiatan niaga dan pertukaran barang yang menyebar dari negara-negara kota di Italia hingga ke seluruh Eropa. Fase ini melahirkan komunitas-komunitas dagang yang menghasilkan barang-barang pokok dan menggelar pekan raya niaga besar-besaran di kota-kota hingga aktivitas perdagangan jarak jauh. Gangguan kekuasaan pada kapitalisme awal ini belum banyak, orang bekerja mengejar posisi sebagai yang terhormat tetapi masih bertahan pada model produksi di bawah kendali feodal yang tetap merawat stabilitas struktur kekuasaan raja sebagai penguasa atas tanah.<sup>24</sup> Aktivitas perdagangan barang melahirkan lalu lintas “berita” sebagai bentuk komunikasi perdagangan jarak jauh para pedagang dalam bentuk surat menyurat. Hal ini oleh Habermas disebut sebagai awal munculnya kesadaran kritis yang nantinya akan menumbangkan kekuasaan feodal.<sup>25</sup>

Lalu lintas berita melalui surat menyurat di kalangan pedagang berangkat dari kebutuhan mereka akan informasi yang lebih banyak dan lebih tepat, perihal kebutuhan-kebutuhan pemasokan barang-barang di tempat yang jauh. Sejak abad ke-14, setelah surat menyurat berkembang sebagai sumber berita, para pedagang mulai mengorganisasikan surat menyurat itu ke dalam serikat-serikat dagang. Itulah awal kemunculan korespondensi, yang mengatur pengorganisasian alamat-alamat para pedagang. Surat menyurat didistribusikan secara teratur dengan pos surat umum pada hari-hari tertentu. Aktivitas pengelolaan berita ini semata-mata dikonsumsi hanya untuk kepentingan perdagangan bagi kalangan pedagang saja. Aktivitas serupa belum ada di luar para pedagang. Korespondensi tadi mulai dikelola sebagai *newsletters* yaitu surat-surat yang dikumpulkan oleh serikat dagang, dan masih ditujukan untuk kalangan pedagang, belum bersifat publik.<sup>26</sup>

Kapitalisme awal selanjutnya mengarah pada perdagangan dalam bentuk-bentuk perusahaan privat yang mengelola modal dalam bentuk saham-saham. Di titik ini, kapitalisme berinteraksi dengan otoritas publik. Kota-kota perdagangan berubah menjadi teritori-teritori negara yang menasionalisasi kegiatan perdagangan.<sup>27</sup> Konsep “negara” modern berkembang sebagai sistem birokrasi yang mengelola akselerasi kebijakan perdagangan, termasuk sistem pajak. Otoritas publik mulai mengontrol perdagangan.<sup>28</sup> Demi kelancaran mengontrol produksi dan perdagangan, otoritas membuat kebijakan-kebijakan rinci termasuk mengontrol perluasan perdagangan

---

<sup>24</sup> Habermas, 14.

<sup>25</sup> Habermas, 15.

<sup>26</sup> Habermas, 16.

<sup>27</sup> Habermas, 17.

<sup>28</sup> Habermas, 16.

internasional yang mencari sumber daya dari luar teritori (kolonialisasi).<sup>29</sup> Relasi kapitalisme dan otoritas publik akibat perluasan aktivitas perdagangan tadi berefek pada lahirnya *civil society* atau masyarakat warga – mereka yang ada di luar relasi kapitalisme dan otoritas publik.<sup>30</sup>

Bagi perkembangan berita, otoritas publik mulai mengorganisir jurnal-jurnal pertama berisi pengelolaan kebijakan otoritas dan terbit harian sejak pertengahan abad ke-17.<sup>31</sup> Sedangkan *newsletters* pada kapitalisme awal berkembang menjadi jurnal-jurnal berisi berita-berita tentang relasi-relasi otoritas publik dan para pedagang, yakni perjamuan kerajaan, perang, hasil panen, pendapatan pajak, pengangkutan logam mulia dan laporan perdagangan luar negeri. Tetapi jurnal-jurnal ini juga belum bersifat publik dan diorganisir hanya untuk kalangan tertentu saja. Sumber jurnal juga masih berasal dari surat-surat, namun telah ada kebijakan editorial berupa penyaringan ketat terhadap surat-surat yang menjadi sumber bagi jurnal. Tidak semua surat kemudian dapat dimuat, di samping karena masih banyak penulis yang tidak ingin surat-suratnya terpublikasi meski hanya untuk kalangan tertentu saja. Banyak konten surat privat yang sebenarnya memiliki kualitas baik untuk dimuat dalam jurnal, editor memuat itu sejauh disetujui oleh pemilik surat dan dinilai tidak memuat hal-hal yang merusak kepentingan. Inilah awal munculnya sensor. Sensor menyebabkan editor mengalami kekurangan sumber, sehingga isi jurnal akhirnya berisi elemen-elemen residual dari surat-surat yang kurang penting.<sup>32</sup>

Jadi ada dua jurnal yang diorganisir di masa kapitalisme awal. *Pertama*, jurnal-jurnal dagang oleh editor serikat-serikat dagang, ditujukan untuk kalangan pedagang saja. *Kedua*, jurnal-jurnal administrasi otoritas publik oleh editor lembaga-lembaga humas, ditujukan untuk relasi otoritas dengan kalangan-kalangan tertentu pada kegiatan perekonomian publik. Jurnal administrasi ini tidak menjangkau mereka yang berada di luar kegiatan perekonomian yang dikontrol otoritas publik.<sup>33</sup> Pada perkembangan selanjutnya, dinamika relasi kapitalisme dengan otoritas publik dalam kegiatan perekonomian ditandai dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang menindas para pelaku kegiatan ekonomi publik, termasuk para pedagang.

Bagi perkembangan berita, jurnal-jurnal yang dikelola serikat-serikat pekerja mulai berkembang tidak hanya pada informasi-informasi penting terkait perdagangan, namun juga mulai berisi tulisan-tulisan terkait instruksi pedagogis bahkan kritik budaya dan kajian-kajian filsafat, sastra, dan seni.<sup>34</sup> Jurnal-jurnal berubah menjadi sarana budaya kritik tertulis. Budaya kritik tertulis ini belum meluas kepada masyarakat warga yang berada di luar kegiatan perdagangan, hanya untuk kalangan borjuis dan dibaca oleh kelas-kelas terdidik yaitu para aparat dan pedagang yang menempati posisi sentral di dalam publik. Budaya kritik tertulis ini hanya dinikmati para hakim, dokter, pastor, opsir, kaum cendekia, para pemodal, saudagar, bankir dan

---

<sup>29</sup> Habermas, 18.

<sup>30</sup> Habermas, 19.

<sup>31</sup> Habermas, 20.

<sup>32</sup> Habermas, 21.

<sup>33</sup> Sombart dan Bücher sebagaimana dikutip Habermas, 22.

<sup>34</sup> Habermas, 24, 25.

pemilik perusahaan dan pabrik.<sup>35</sup> Golongan borjuis semakin menjadi publik yang terbiasa membaca, lalu berkembang dari waktu ke waktu semakin terdidik karena bacaannya semakin kritis. Tetapi perkembangan itu semakin menciptakan tegangan antara “kota” dan “istana.”<sup>36</sup>

Budaya kritik tertulis berkembang menjadi budaya kritik lisan, di mana isu-isu yang dibaca mulai menjadi bahan pembicaraan di kedai-kedai kopi dan salon-salon tempat di mana mereka berkumpul di waktu luang. Budaya kritik tertulis dan lisan berbaur menjadi ruang publik baru yang semakin kritis terhadap kontrol otoritas negara terhadap kegiatan ekonomi. Inilah cikal bakal budaya kritik menurut Habermas. Ketika otoritas publik semakin dalam mengurus urusan privat melalui aturan-aturan administrasi yang sarat kewajiban-kewajiban pajak dan intervensi, maka muncul perlawanan kritis. Publik mulai mampu memberi penilaian bernalar yang menuntut otoritas publik menyesuaikan kebijakannya dengan kepentingan publik. Publik tidak mau ditindas kebijakan yang tidak sesuai kepentingannya. Bagi perkembangan jurnal-jurnal, fase ini menandai kelahiran istilah “pers”, yakni suatu penalaran kritis publik terhadap kebijakan negara. Otoritas publik mulai memaknai kelompok masyarakat sebagai publik kritis, dalam maknanya yang spesifik: “pers.”<sup>37</sup>

Pada paruh pertama abad ke-18, budaya kritik tertulis dan lisan semakin populer di ruang publik borjuis. Jurnal-jurnal mulai bersifat surat kabar berkala, dicetak rutin harian, diedarkan luas, kini tidak hanya untuk kalangan sendiri, tetapi semakin luas menjangkau masyarakat warga lintas wilayah.<sup>38</sup> Konten surat kabar semakin kritis, berisi ulasan para cendikia mengenai buku, sejarah dan moralitas. Budaya kritik tertulis ini semakin membangkitkan kelas-kelas perkotaan berdasarkan rasa kesamaan yang berpikiran kritis di kedai-kedai kopi dan salon-salon. Debat di ruang publik semakin kritis, terhubung secara translokal karena kemudian orang pada teritori-teritori lain yang terdekat mulai menjangkau bacaan-bacaan yang sama. Publik menjadi semakin kritis, karena debat memunculkan pendapat-pendapat yang kemudian disoroti dalam tajuk-tajuk utama surat kabar. Surat kabar berkala pada tahapan selanjutnya semakin berisi kritik dan kajian-kajian budaya, masalah sopan santun dan moral,<sup>39</sup> mengenai perilaku amal, sekolah untuk orang miskin, peningkatan pendidikan, permohonan untuk bentuk perilaku yang beradab, polemik melawan kejahatan perjudian, polemik melawan kejahatan fanatisme, polemik melawan keangkuhan, polemik melawan kehampaan estetika dan polemik melawan keeksentrikan orang terpelajar.<sup>40</sup>

Publik semakin membaca dan semakin mendebat sesuatu, semakin intens mendorong lebih banyak orang untuk berdiskusi dan menulis. Intensitas itu menurut Habermas sangat aktif, terlacak dari membanjirnya surat-surat yang ditujukan kepada editor surat-surat kabar berkala. Bahkan pada waktu itu, dua majalah Inggris *Spectator* dan *Guardian*, membuka wadah khusus untuk mengakomodasi surat-surat masyarakat kepada editor. *Spectator* misalnya membuat pengumuman khusus: di sisi barat warung

---

<sup>35</sup> Habermas, 22, 23.

<sup>36</sup> Habermas, 23.

<sup>37</sup> Habermas, 24.

<sup>38</sup> Habermas, 41.

<sup>39</sup> Habermas, 42.

<sup>40</sup> Habermas, 43.

kopi Button's, ada sebuah kepala singa terpasang yang melalui rahangnya para pembaca dipersilahkan melemparkan suratnya.<sup>41</sup>

Namun kemudian budaya kritik tadi tidak berlangsung lama. Itu membantu kelahiran demokrasi, tetapi kemudian meredup oleh industrialisasi. Habermas melihat budaya kritik hidup dalam ruang publik yang sarat perkembangan teknologi dan industrialisasi dalam berbagai bidang.<sup>42</sup> Surat-surat kabar berkala sebagai pemantik budaya kritik publik berkembang menjadi media massa yang dijangkau luas. Media massa ini mulai dikelola berbasis usaha, karena mengupayakan permintaan tiras yang besar dari publik pembaca. Media massa kemudian menjadi industri. Di Jerman, pasca perang pada akhir 1950-an dan awal 1960-an semakin berkembang industri media massa, industri periklanan, industri humas dan jajak pendapat publik.<sup>43</sup> Surat kabar berkala yang berisi budaya kritik mulai diambil alih oleh surat kabar bergambar yang didanai oleh investor pemasang iklan dan didistribusikan melalui layanan berlangganan yang berupaya menaikkan tingkat penjualan.<sup>44</sup> Inilah awal dari komersialisasi surat kabar berkala.

Kebijakan editorial pada surat kabar tidak lagi otonom dan dikendalikan demi kelancaran bisnis investor.<sup>45</sup> Kesempatan ini digunakan oleh lembaga humas untuk membayar ruang iklan untuk membentuk citra politik.<sup>46</sup> Gerakan lembaga humas semakin intens dengan pembentukan pendapat publik melalui jajak pendapat yang hasilnya memoles citra politik dan dimuat dalam halaman-halaman iklan surat kabar.<sup>47</sup> Dalam keadaan itu, Habermas melihat bahwa ruang publik dengan budaya kritik telah direfeodalisasi. Artinya, komunikasi publik yang kritis telah kembali pada bentuk komunikasi publik di “depan warga” (pada masa feodal). Ironisnya, pembalikan itu difasilitasi oleh media massa. Kebiasaan kekuasaan feodal yang berpidato di depan warga, tanpa ada interaksi dengan warga, bangkit lagi dalam pola yang baru. Warga berada dalam posisi pasif yang harus mendengarkan satu arah pidato penguasa.<sup>48</sup>

Kata Habermas: “Aura otoritas yang dipertontonkan di hadapan warga dipicu lagi oleh industri komunikasi modern. Hubungan masyarakat tidak bekerja untuk kepentingan publik, tetapi demi reputasi otoritas. Ruang publik menjadi arena di mana prestise publik otoritas dapat ditampilkan – daripada di mana debat kritis dilakukan.”<sup>49</sup> Media massa berada dalam aktivitas pengelolaan dua komoditas yang mereka jajakan pada saat yang sama, yakni ruang iklan yang dijual kepada pengiklan, dan bagian editorial di mana iklan itu tadi disematkan, dijual kepada publik konsumennya.<sup>50</sup> Industri media massa telah menyebabkan masuknya kepentingan partikularistik produsen dan konsumen barang serta jasa komersial ke dalam aktivitas komunikasi

---

<sup>41</sup> Habermas, 42.

<sup>42</sup> Habermas, 161.

<sup>43</sup> Habermas, 2.

<sup>44</sup> Habermas, 162.

<sup>45</sup> Habermas, 186, 87.

<sup>46</sup> Habermas, 220, 36.

<sup>47</sup> Habermas, 220, 36.

<sup>48</sup> Habermas, 200.

<sup>49</sup> Habermas, 200.

<sup>50</sup> Habermas, 184.

publik. Industrialisasi, refeodalisasi, warga pasif dan tidak kritik, menjadi tanda kematian budaya kritik yang semakin parah ketika media massa berbasis industri radio, televisi, dan bioskop bermunculan.<sup>51</sup> Itulah keadaan kontemporer media massa.<sup>52</sup>

Keadaan kontemporer media massa berbasis industri surat kabar, radio, televisi, dan bioskop menurut Habermas telah meredupkan debat-debat di salon dan kedai kopi dan menyebabkan bubarnya kelompok-kelompok guyub yang biasa minum atau rekreasi bersama. Habermas melihat bahwa waktu luang masyarakat yang sebelumnya digunakan untuk perbincangan di kedai-kedai kopi dan salon berubah menjadi aktivitas menonton televisi dan karena itu diskusi-diskusi dianggap tidak diperlukan lagi.<sup>53</sup> Analisa lainnya, Habermas menyebut kecenderungan adanya perdebatan rasional yang hanya dilakukan oleh segelintir orang yang dianggap ahli, tetapi ditata oleh televisi, radio, dan surat kabar komersial sebagai program atau konten yang dibisniskan. Program semacam itu menurut Habermas dikelola dengan hati-hati agar bisa dikonsumsi sesuai harga pasar. Semua konten media massa kontemporer yang diedarkan kepada publik disusun dalam hitung-hitungan keuntungan.<sup>54</sup> Akhirnya, kebangkitan industri media massa telah mengubah warga dalam budaya kritik menjadi warga pasif tanpa kritik. Warga bukan lagi generator atau penggerak yang partisipatif, tetapi hanya penerima informasi. Kembali pada masa feodal, warga menonton presentasi diri yang agung dari raja, tanpa ada kesempatan menalar apa yang disaksikannya. Publik dalam budaya kritik yang dipantik oleh media massa awal, kini menjadi publik dalam budaya konsumsi oleh media massa kontemporer.<sup>55</sup>

Borden dalam pemikirannya mengungkapkan lebih menginginkan jurnalisme dan pers memisahkan dirinya dari istilah “media massa.” Menurutnya, meski kuno, istilah “pers” justru menggambarkan dengan jelas mengapa ada istilah “jurnalisme.” Bagi Borden, istilah “pers” mengandung suatu tradisi jurnalistik yang kuat dan telah melalui 250 tahun sejarah “tahan uji” terhadap terkooptasi uang dan intimidasi kuasa politik dalam menulis pemberitaan-pemberitaan yang mendalam.<sup>56</sup> Itulah “jurnalisme” menurut Borden. Jurnalisme dan pers merupakan suatu tradisi demokrasi yang mendalam. Kedalaman itu dijelaskan Habermas dalam pernyataannya: “Bahwa ada perbedaan mendasar mengenai jurnalisme yang berorientasi pada memaksimalkan keuntungan dibandingkan jurnalisme yang berorientasi pada penciptaan pengetahuan.”<sup>57</sup>

Bagi Borden, jurnalisme semata-mata mengenai penciptaan pengetahuan dan di luar itu, misalnya mengenai pemasaran media, jurnalisme telah runtuh.<sup>58</sup> Menurut

---

<sup>51</sup> Habermas, 189.

<sup>52</sup> Habermas, 228, 29.

<sup>53</sup> Televisi dianggap sebagai “kesatuan tanpa percakapan” dalam keluarga. Habermas mengutip Maccoby yang mengatakan bahwa sembilan dari sepuluh keluarga tidak banyak melakukan percakapan, bahkan perbedaan sudut pandang antar anggota keluarga direduksi, karena penonton televisi hanya menonton dan menjadi pasif (Habermas, 228, 29.).

<sup>54</sup> Habermas, 230, 31.

<sup>55</sup> Habermas, 238.

<sup>56</sup> Borden, 32.

<sup>57</sup> Borden, 31.

<sup>58</sup> Borden, 31.

Borden, tradisi demokrasi, kewarganegaraan, pengetahuan, dan kebebasan telah menjadi alasan bagi pekerjaan jurnalistik yang kuat selama berabad-abad. Itulah tradisi jurnalisme sebelum munculnya teknologi elektronik. Tradisi inilah yang menjadikan jurnalisme dapat dipahami sebagai suatu aktivitas tetapi juga ideologi yang kuat dan telah berpartisipasi dengan sangat jelas dalam transisi feodalisme kepada demokrasi dengan itikad baik untuk membangun kehidupan bersama yang setara.<sup>59</sup> Bagi Borden, sejak kemunculan mesin cetak, jurnalisme memulai tradisinya dengan pengungkapan kebenaran secara mendalam dalam tulisan-tulisan di atas kertas. Jurnalisme cetak telah menjadi tradisi yang begitu kuat dan diyakini sebagai tradisi jurnalisme yang berani, mendalam dan tidak sepele-sepele dalam menampilkan pemberitaan publik. Kelahiran elektronik kemudian mengubah wajah media massa dan menyebabkan berserakannya berita yang tidak mendalam. Munculnya elektronik misalnya melahirkan berita (televisi) sejauh tontonan yang tidak mendalami berita sesungguhnya. Borden melihat kecenderungan televisi dalam menghadirkan tayangan hiburan mengandung kelemahan jurnalismenya untuk dapat disebut sebagai tradisi jurnalisme yang sekuat jurnalisme cetak tadi.<sup>60</sup> Alasannya sederhana, bahwa televisi dalam jurnalismenya mendramatisasi berita dengan gambar dan suara dan ketika meliput acara secara langsung, ia hanya menyaksikan berita, tidak “menemukan” berita itu dan menjadikannya mendalam seperti yang sudah menjadi tugas jurnalisme cetak selama ini.<sup>61</sup>

Kemunculan internet pada tahun 1969 menurut Borden memperlemah tradisi jurnalisme. Penulisan blog di internet memunculkan masalah. Blogger menjadi seakan-akan jurnalis, dan tulisan-tulisan di blog menjadi seakan-akan berita yang diproduksi layaknya produk jurnalistik. Bagi Borden, tulisan blog tidak dapat dikatakan sebagai produk jurnalistik. Tetapi pembaca tidak akan berpikir demikian. Pembaca mengkonsumsi bacaan yang tersedia di genggaman tangannya. Mencemaskan, karena berita blog yang dibangun atas dasar subjektivitas (bisa saja kepentingan politik dan personal seseorang) lalu dianggap sebagai produk jurnalistik oleh publik.<sup>62</sup> Internet kemudian memunculkan kemudahan produk-produk tulisan “seakan-seakan jurnalistik” bersebaran secara bebas. Siapa saja bisa menulis, bahkan tanpa melakukan prosedur pekerjaan jurnalistik. Menurut Borden ini dianggap sebagai jurnalisme baru dan hal itu merusak tradisi jurnalisme. Kata Borden: “Jurnalisme baru menjungkirbalikkan otoritas epistemik dengan mengubah penekanan pemberitaan dari fakta ke adegan, beralih dari sumber resmi ke sumber yang diinginkan sesukanya.”<sup>63</sup> Tidak ada lagi prosedur lama dalam jurnalisme baru menurut Borden. Kebenaran pun menjadi bias, karena tradisi jurnalisme mengenai “dapatkan kebenaran dan cetaklah” telah berubah.<sup>64</sup> Menurut Borden, jurnalisme baru lebih mementingkan “berceritalah

---

<sup>59</sup> Borden, 31.

<sup>60</sup> Borden, 32.

<sup>61</sup> Borden, 32.

<sup>62</sup> Borden, 34.

<sup>63</sup> Borden, 36.

<sup>64</sup> Borden, 38.

segera” dan siapapun yang bercerita paling awal menempati posisi unggul dalam persaingan industri media massa.<sup>65</sup>

Borden membuat suatu rumusan mengenai keutamaan moral jurnalisisme sesungguhnya: “Sejak zaman kebohongan (feodalisme) mulai dilawan, jurnalisisme telah bersandar pada otoritas dan legitimasinya terutama pada komitmennya untuk mengungkap kebenaran dan melaporkannya secara akurat dan rinci tanpa prasangka atau motif tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, jurnalis mengembangkan rutinitas untuk mencapai pelaporan yang obyektif, atau “pelaporan fakta yang terverifikasi.” Rutinitas ini termasuk menggunakan tanda kutip untuk menandai pernyataan kata demi kata, dan menyeimbangkan pernyataan-pernyataan narasumber. Jurnalisisme mengandung objektivitas sebagai norma profesinya yang “sekaligus merupakan cita-cita moral” dan suatu pekerjaan yang melewati pelaporan mendalam, penyuntingan, dan pengamatan langsung yang mendalam.”<sup>66</sup> Tetapi menurut Borden semua itu berubah setelah industri elektronik media massa muncul: “Jurnalisisme kemudian beranjak pada beberapa fungsi strategis: meningkatkan efisiensi bagi bisnis yang mempekerjakan jurnalis, menangkis kritik, dan menstandarisasi penilaian jurnalistik.”<sup>67</sup> Sebuah pesimisme muncul. Habermas menyebut bahwa dimensi kritis media massa mati karena industrialisasi, Borden lalu menyebut industrialisasi mengubah jurnalisisme kepada strategi-strategi bisnis yang menangkis kritik. Tetapi kembali pada pertanyaan masalah tulisan ini di awal: jika tanpa jurnalisisme, lalu apa saluran kritis yang tersedia bagi komunikasi masyarakat warga di ruang-ruang publik? Pertanyaan ini perlu dijawab meski era digitalisasi tampak berjalan berlawanan dengan harapan Habermas dan Borden.

Habermas dengan tegas mengatakan bahwa komunikasi ideal manusia adalah pembicaraan diskursif yang setara, timbal balik, dilakukan secara langsung. Respon menjadi sangat penting, dan anonimitas tidak diperkenankan.<sup>68</sup> Bagi Habermas, industrialisasi telah menempatkan kuasa uang dan kuasa politik sebagai pengontrol media massa. Kooptasi ini mematikan upaya independensi yang dibutuhkan media massa sekaligus menyulitkan upaya menghadirkan komunikasi setara yang diskursif dalam ruang publik. Karena segala sesuatu dikendalikan oleh kuasa politik dan kuasa uang, maka media massa yang seharusnya menjadi saluran kritik masyarakat warga malah menjadi saluran pencarian uang oleh kapitalisme sekaligus saluran yang menayangkan komunikasi citra penguasa dibanding kepentingan masyarakat warga itu sendiri.

Borden mengenai jurnalisisme menyebut bahwa fungsi deliberatif pers menjadi sangat penting. Mengutip Barger dan Barney, Borden mengatakan tujuan penting jurnalisisme adalah menghasilkan apa yang disebut pengetahuan demokratis yang memerlukan forum debat yang pluralistik. Mengutip May dan Demers, Borden menawarkan peningkatan musyawarah demokratis untuk “menciptakan kemungkinan

---

<sup>65</sup> Borden, 38.

<sup>66</sup> Borden, 38.

<sup>67</sup> Borden, 38.

<sup>68</sup> Habermas, "Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Have an Epistemic Dimension?," in *Europe: The Faltering Project*, 139.



kehidupan publik yang kuat dalam sebuah republik” dan “tugas utama jurnalis adalah menyebarkan informasi yang menerangi pilihan kolektif.”

Catatan-catatan Habermas dan Borden sebenarnya memberi suatu jalan keluar bagi kemungkinan peran demokratis jurnalisme. Sebagaimana pernah dikemukakan penulis dalam buku *Kritik Atas Media Massa* bahwa Habermas sesungguhnya memberikan kritik, tetapi menyertakan suatu syarat perbaikan, yang meskipun sulit, tetapi itulah tujuan kritik, merekomendasikan perbaikan. Habermas dengan jelas menyatakan bahwa media massa perlu meregulasi dirinya agar independen dan memungkinkan teknologi yang dimilikinya sebagai teknologi yang berkualitas diskursif. Perbaikan ini juga coba direkomendasikan Borden dalam bukunya *Journalism as Practice: MacIntyre, Virtue Ethics and the Press*. Melandaskan pemikirannya kepada etika keutamaan MacIntyre,<sup>69</sup> Borden memberi rekomendasi bagaimana agar jurnalisme tetap pada jalur demokratis. Menurut Borden perlu untuk “menimbang ciri-ciri keutamaan moral jurnalis dan membangun kebajikan jurnalis.” Rekomendasi Borden ini juga tidaklah mudah, sebagaimana yang diajukan Habermas. Bagi Borden, “menimbang ciri-ciri keutamaan moral jurnalis dan membangun kebajikan jurnalis” harus memperhatikan bagaimana (1) jurnalisme menjauhkan diri dari pengaruh merusak kooptasi eksternal (dalam Habermas inilah sistem kapitalis dan politik), (2) menjaga kesehatan kebebasan ekspresi yang dijamin oleh konstitusi negara, (3) menjaga prosedur jurnalistik dari kecenderungan penulisan yang dangkal dan tidak divalidasi. Tiga hal ini oleh Borden merujuk pada “bagaimana jurnalisme mengatur dirinya untuk menjadi bijak dan berkeutamaan moral.”<sup>70</sup> Menganai suramnya masa depan jurnalisme dan media massa dalam demokrasi, Habermas dan Borden sama-sama mengajukan “pengaturan diri” sebagai jalan keluar.

---

<sup>69</sup> Keutamaan menjadi titik pijak dalam diskusi etika. Sejak *After Virtue* karya Alasdair MacIntyre, keutamaan kembali menempati posisi penting lagi dalam etika modern. Bagi Aristoteles, keutamaan pokok manusia yang sentral adalah kebijaksanaan (*phronesis*), yaitu kemampuan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan dan keputusan akal budi yang benar. MacIntyre memperdalam dan memperluas pengertian “keutamaan” dengan memasukkan tiga faham yang khas bagi manusia dan menurutnya merupakan kerangka yang harus dipakai untuk mengerti manusia, yaitu: (1) Faham “Aktivitas Bermakna” (*Practice*), (2) Faham “Tatanan Naratif Kehidupan Seseorang” (*Narrative Order of a Single Human Life*) dan (3) Faham “Tradisi Moral” (*Moral Tradition*). Borden melandaskan pemikirannya mengenai menjaga tradisi jurnalisme dalam batas-batas etika keutamaan MacIntyre berdasarkan faham yang ketiga yakni Faham “Tradisi Moral” (*Moral Tradition*). Bagi MacIntyre, kehidupan seorang anak manusia tidak pernah sendirian. Hidupnya berada dalam cerita komunitas-komunitas yang darinya ia memperoleh identitasnya. Manusia adalah dirinya sebagai anggota, keluarga, desa, suku, bangsa, agama dan sebagainya. Ia terikat pada realitas sosial karena sejumlah utang budi, warisan, harapan dan kewajiban sah. Semua adalah realitasnya, titik tolak moralitasnya. Meskipun dalam studi filosofis ada perdebatan khusus sesama filsuf, Habermas dan MacIntyre, namun itu tidak dibahas dalam tulisan ini. Karena tulisan ini sedang mencari jalan keluar mengenai masa depan jurnalisme demokratis dari pemikiran Habermas dan Borden. Borden melandaskan pemikirannya dari MacIntyre, tulisan ini sejauh memperlihatkan bahwa tradisi jurnalisme mengandung suatu tradisi moral demokratis yakni suatu dimensi kritis bahwa kebenaran tidak dapat diganggu oleh kekuatan di luar media massa.

<sup>70</sup> Borden, 66.

## **Regulasi Diri: Upaya Kebangkitan Jurnalisme**

Regulasi diri media massa dianggap Habermas sebagai titik berangkat dari upaya untuk mewujudkan independensi dan karakter deliberatif media massa.<sup>71</sup> Bagi Borden, jurnalisme merupakan tradisi kebajikan yang perlu dijamin semapan mungkin oleh konstitusi negara sebagai bagian dari jaminan atas kebebasan berekspresi.<sup>72</sup> Beranjak, mengubah diri menjadi jurnalisme yang baik bukanlah hal yang mudah, sebagaimana dikatakan pemikir hukum media Inggris, Tim Crook. Crook bahkan melihat bahwa menghasilkan jurnalisme “yang baik” bisa jadi disadari oleh para pelaku, tetapi sulit diterapkan.<sup>73</sup> Pesimisme semacam ini mula-mula menjadi kesimpulan kecil penulis ketika melihat tuntutan Habermas dan Borden. Dengan mengatakan bahwa media baru kehilangan kemampuannya untuk berorientasi pada penciptaan pengetahuan,<sup>74</sup> secara langsung Borden mengatakan matinya potensi epistemik pada jurnalisme baru dan hal itu menyetujui pernyataan Habermas mengenai hilangnya diskursivitas media massa demokratis.<sup>75</sup> Pertanyaan yang menjadi pokok masalah yang ingin dijawab penulis kembali muncul: jika tanpa jurnalisme, lalu apa saluran kritis yang tersedia bagi komunikasi masyarakat warga di ruang-ruang publik?

Hardiman dalam telaahnya mengenai Habermas menyebut bahwa fungsi artikulasi masalah-masalah masyarakat hanya dapat dijalankan oleh ruang publik politis dengan basisnya yaitu masyarakat warga itu sendiri. Menurut Hardiman, Habermas mencirikan peran ruang publik itu sebagai “papan pantul untuk masalah- masalah” atau “sistem peringatan dengan sensor-sensor yang tidak terspesialisasi namun sensitif ke seluruh masyarakat.” Tetapi, ruang publik semacam itu dapat terwujud jika ia transparan, artinya memiliki ciri otonom, tidak terkooptasi kekuasaan administratif negara dan kepentingan-kepentingan kapitalisme. Ciri otonom itu tidak lain ialah hak-hak dasar yang secara konstitusional menjamin ruang tindakan (hak berserikat dan membentuk perkumpulan), keamanan infrastruktur-infrastruktur media massa (kebebasan pers, penyiaran, televisi dan kegiatan publikasi), hubungan dengan sistem politik (hak partai dalam berpartisipasi pada deliberasi-deliberasi publik), dan pluralisme (proteksi terhadap keberagaman cara-cara hidup, subkultur-subkultur, orientasi kepercayaan dan hak utuh wilayah-wilayah privat).<sup>76</sup>

Telaah Hardiman ini menunjukkan bahwa Habermas melihat eksistensi media massa sebagai bagian dari masyarakat warga itu sendiri. Sampai di sini, urgensi jurnalisme dalam ruang publik dapat menjadi jawaban sementara bagi pertanyaan tadi. Tetapi masalah tidak lalu selesai. Kembali kepada Crook, kesadaran jurnalisme akan

---

<sup>71</sup> Habermas, "Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Have an Epistemic Dimension?," in *Europe: The Faltering Project*, 139.

<sup>72</sup> Borden, 66.

<sup>73</sup> Tim Crook, "Ten Ways Journalism Industry Can Improve Self Regulation and Regain the Trust of the Public," *Press Gazette*, 2016.

<sup>74</sup> Borden, 31.

<sup>75</sup> Kodoati, 15.

<sup>76</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' Dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 138.

perlunya meregulasi diri telah ada. Bahkan oleh Christians dkk, kode etik profesi telah menyediakan tujuan sistematis dalam menciptakan kesadaran organisasi, menjadi mekanisme kontrol internal dalam rangka meningkatkan tanggung jawab, namun kode etik profesi pada akhirnya tidak cukup, karena kadang kala digunakan sebagai alat untuk “mengecat keburukan” media massa.<sup>77</sup> Kesadaran akan pentingnya regulasi diri ditantang oleh gempuran sistem yang terlalu kuat. Di hadapan kuasa uang dan kuasa politik yang menyatu sebagai sistem yang kuat dalam dunia kehidupan (apa yang oleh Habermas disebut sebagai *lebenswelt* menciut di hadapan sistem), media massa menjadi tidak berdaya, apa yang oleh Koch disebut sebagai realita kontemporer dengan media massa berada dalam kungkungan kapitalisme lanjut dan kuasa politik penuh siasat persuasif demi citra.<sup>78</sup>

Realita itu sungguh ada ketika kekuasaan politik bersamaan menjadi pemilik media. Kasus Silvio Berlusconi di Italia menjadi contoh. Dan contoh itu dekat dengan kondisi Indonesia, ketika tokoh dibalik kepemilikan media-media besar merupakan politisi. Tantangan yang begitu kuat itu yang menurut penulis mendasari Habermas dan Borden sama-sama melihat bahwa “regulasi diri” adalah jalan satu-satunya untuk menegakkan jurnalisme demokratis. Habermas melihat hanya regulasi diri yang menjamin independensi media massa, seperti kata Borden, pada dua dari tiga rekomendasinya: (1) jurnalisme menjauhkan diri dari pengaruh merusak kooptasi eksternal dan (2) menjaga kesehatan kebebasan ekspresi yang dijamin oleh konstitusi negara.

Lalu bagaimana “regulasi diri” itu kemudian dapat diwujudkan demi jurnalisme dan media massa yang demokratis? Jawaban pertanyaan ini hendak menuju pada suatu harapan tentang “bangkitnya” jurnalisme yang telah divonis mati oleh Habermas dan Borden sendiri. Kebangkitan ini juga diupayakan berdasarkan petunjuk-petunjuk Habermas dan Borden sebagaimana diutarakan dalam kritik mereka. Penulis mengemukakan setidaknya ada dua diskusi penting untuk melihat perlunya memperluas pemaknaan mengenai kebutuhan meregulasi diri bagi media massa dan apa yang perlu diperluas dari konsep regulasi diri menurut Habermas dan Borden.

*Pertama*, penulis melihat bahwa regulasi perlu dibentuk berdasarkan kekhasan kebebasan media massa dan terus diperbaharui atau dibicarakan terus menerus sesuai kebutuhan zaman. Mengenai ini, Christians, dkk melihat bahwa meski media massa telah dibekali dengan regulasi, gempuran komersialisasi maupun propaganda politik terselubung dari sumber-sumber kekuasaan politik akan terus ada dengan motif yang terus berubah pada masyarakat yang juga plural. Masyarakat plural itu pun dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.<sup>79</sup> Dalam arti itu, kekhasan suatu komunitas masyarakat warga diperlukan dalam penyusunan sebuah regulasi. Mengenai ini Haryatmoko

---

<sup>77</sup> Clifford G. Christians, John P. Ferré, and P. Mark Fackler, *Good News: Social Ethics and the Press* (1993), 135.

<sup>78</sup> Koch, in *The Habermas Handbook*, 592.

<sup>79</sup> Menurut Clifford G. Christians, dkk, keragaman pluralitas berdasarkan struktur sosial (keluarga, gereja, sekolah, pemerintahan, bisnis, pers dan pengadilan), berdasarkan kultur (budaya, suku), berdasarkan keragaman pengakuan (ideologi, falsafah hidup dan kepercayaan) (Christians, Ferré, and Fackler, 188, 89.)

melihat perlu adanya diskusi tentang kriteria regulasi yang mendasari ide kekhasan kebebasan media massa dalam masyarakat yang plural.<sup>80</sup> Hal ini tentu sejalan dengan Habermas bahwa diskursus itu sendiri sebagai prosedur yang tepat bagi komunikasi dalam publik yang plural.<sup>81</sup> Borden juga menekankan bahwa komunitas, kehidupan bersama, masyarakat itu sendiri merupakan inti dari bangunan partisipasi yang membentuk keutamaan jurnalisme.<sup>82</sup> Maka kiranya tepat dengan maksud itu bahwa sebuah regulasi yang dibentuk perlu didasarkan pada kekhasan suatu komunitas masyarakat. Dalam hal ini tentu konsep kekhasan kebebasan media massa di Jerman atau Amerika tidak selalu dapat dianggap cocok dengan konsep di Indonesia. Artinya, setiap komunitas negara memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam menyusun regulasi media massa. Dalam konteks Indonesia, kriteria regulasi media massa tentu perlu diletakkan pada kebutuhan untuk menjawab kekhasan Pancasila sebagai sumber hukum negara,<sup>83</sup> tetapi juga dengan memperhatikan perluasan teknologi yang terjadi.

*Kedua*, sedikitnya ada tiga hal yang menurut penulis perlu dilanjutkan sebagai diskusi dari realisasi regulasi diri media massa. Tiga hal ini penulis gali dari tiga subjek penting pada inti kritik Habermas sendiri mengenai media massa, dua diantaranya merupakan sasaran kritik Habermas yakni sistem kapitalisme dan sistem kekuasaan politik, satu lainnya berasal dari konsep manusia Pencerahan yang berpikir bebas. Menurut penulis, regulasi media massa perlu mengakomodasi ketentuan-ketentuan mengenai, (1) regulasi keadilan pasar, (2) komisi mandiri dan (3) martabat manusia.

Menyangkut yang *pertama*, regulasi media massa perlu mengatur keadilan pasar. Haryatmoko melihat regulasi diri media massa dapat stabil jika di dalamnya mengatur cara-cara kapitalisme untuk bertindak adil dalam persoalan konsentrasi ekonomi agar tidak hanya dinikmati oleh media tertentu saja.<sup>84</sup> Regulasi media massa perlu mengatur agar setiap televisi menayangkan durasi yang seimbang untuk beragam program.<sup>85</sup> Borden mengenai ini melihat penting untuk mengatur agar logika kapitalisme dapat membantu jurnalis memperkuat organisasi tempatnya bekerja dan pada saat yang sama

---

<sup>80</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, Dan Pornografi* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 157.

<sup>81</sup> Kodoati, 85.

<sup>82</sup> Borden, 43.

<sup>83</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 88.; Pancasila memang dikenal sebagai konsep universal mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan, tetapi tentu konsep-konsep universalitas itu berakar dari karakter Indonesia yang tentu berbeda dengan prinsip universalitas dalam karakter Barat. Meski Pancasila mengandung nilai-nilai universal, pluralitas berdasarkan struktur sosial, kultur dan ragam keyakinan “yang khas Indonesia” membedakannya dari pluralitas negara lain.

<sup>84</sup> Haryatmoko, 148.

<sup>85</sup> Menurut Haryatmoko, publik Indonesia sekarang lebih menyukai program televisi yang menghibur daripada program informasi yang mendidik atau berita. Dalam pengertian itu, media massa bernalar akan kalah saing dengan media massa yang berisi hiburan. Regulasi yang tidak adil akan dapat mendorong televisi-televisi berupaya membuat program yang menjual dengan tetap menayangkan berita tetapi kualitasnya diubah menjadi berita hiburan (*politic entertainment* dan *news entertainment*), bukan lagi berita yang berbentuk diskursus, memberi informasi dan mendidik publik (Haryatmoko, 148.); Misalnya menjadi tidak adil ketika Metro TV menayangkan 80 persen tayangan berita sementara RCTI menayangkan 80 persen tayangan sinetron.

juga menjaga agar tidak terjadi pengaburan yang tidak bijaksana antara pekerjaan jurnalistik dan bisnis media.<sup>86</sup>

*Kedua*, soal komisi mandiri. Regulasi diri media massa perlu diperluas kepada perhatian akan pentingnya organ yang bertindak sebagai wasit agar regulasi media massa dihormati.<sup>87</sup> Di Indonesia organ semacam ini adalah Dewan Pers yang dibentuk sebagai amanat UU Pers. Tetapi eksistensi Dewan Pers menurut Borden belum cukup kuat. Perlu adanya organisasi etik independen selain Dewan Pers untuk menjaga keragaman pengawasan dan memastikan jarak dekat pengawasan terjadi.<sup>88</sup> Di Indonesia, organisasi semacam ini sudah ada, misalnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), salah satu yang paling mapan secara organisasi. Inisiatif mengenai regulasi perlu dibicarakan terus menerus, dalam konteks media massa, organ ini dapat menjadi inisiator untuk sering membicarakan pembaharuan regulasi. Menjadi bahan refleksi sekarang ini, setelah dua puluh tahun lebih diperundangkan, inisiatif untuk itu hingga kini meski sudah ada, tetapi belum terlalu terlihat.

Lalu yang *ketiga* soal martabat manusia. Maksudnya, regulasi yang dipakai sebagai sarana regulasi diri media massa akhirnya pertama-tama ditujukan pada penegakkan martabat manusia.<sup>89</sup> Habermas dalam hal ini juga memberi sumbangannya tentang pentingnya hukum ditujukan demi kebahagiaan pribadi manusia.<sup>90</sup> Namun kiranya tidak berlebihan untuk menafsirkan tuntutan normatif itu dengan pandangan yang lebih praktis seperti misalnya terdapat pada Haryatmoko dalam pemikirannya mengenai etika komunikasi, bahwa dalam hidup bersama standar dasarnya ialah kewajiban untuk hormat pada diri dan orang lain. Orang yang tidak hormat pada orang lain, ia tidak hormat pada dirinya.<sup>91</sup> Dipicu oleh pemikiran McIntyre, Borden melihat bahwa keutamaan mengandaikan adanya hukum yang menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk mengejar kebahagiaannya.<sup>92</sup>

## **KESIMPULAN**

Hardiman dalam telaahnya mengenai konsep ruang publik Habermas mengemukakan bahwa media massa merupakan “satu-satunya” harapan yang tersisa sebagai saluran kritik ruang publik. Pernyataan itu masih kurang lengkap karena Hardiman mengutip Habermas menyebut bahwa “sayangnya apa yang tersisa itu tidak dapat diharapkan.”<sup>93</sup> Pesimisme akan masa depan demokratis jurnalisme tentu mengkhawatirkan. Namun melihat langkah Borden, yang dari seorang jurnalis kemudian beralih memikirkan konsep keutamaan tradisi jurnalisme dan mengkritik jurnalisme itu sendiri. Dan melihat Habermas, yang dalam tuntutanannya yang terlalu sulit untuk diwujudkan oleh media massa. Sesungguhnya semuanya menyisakan suatu

---

<sup>86</sup> Borden, 76.

<sup>87</sup> Haryatmoko, 153.

<sup>88</sup> Borden, 70.

<sup>89</sup> Haryatmoko, 167.

<sup>90</sup> Hardiman, 69.

<sup>91</sup> Walzer sebagaimana dikutip Haryatmoko, 167.

<sup>92</sup> Borden, 43.

<sup>93</sup> Hardiman, 142, 43.

harapan mengenai perbaikan kualitas jurnalisme dalam operasi media massa di era kontemporer yang memang terlalu mengkhawatirkan. Ini tidak lain merupakan kekhawatiran tentang bagaimana demokrasi tetap sehat dalam dimensi kritisnya. Kekhawatiran ini memunculkan pertanyaan: dengan saluran apa dimensi kritis itu dikomunikasikan kepada para pemilik kuasa agar demokrasi tidak diganggu? Oleh sebab itu jurnalisme penting untuk tetap ada bagi demokrasi. Regulasi diri merupakan satu-satunya jalan yang menjamin jurnalisme diakui sebagai bagian kebebasan berekspresi yang sangat mendasar untuk tidak diganggu oleh kuasa uang dan politik. Kematian daya kritis jurnalisme bukanlah harapan demokrasi. Jurnalisme merupakan kebebasan berekspresi dan berbicara, tetapi memastikan ia berjalan pada poros demokrasi merupakan hal yang signifikan. Kebebasan tanpa regulasi mengarahkan demokrasi kepada banalitas. Dalam konteks komunikasi demokratis, banalitas mengandaikan opini publik secara serampangan ditampilkan, itu diterima dan dianggap wajar, tetapi dangkal, tidak dalam pemaknaan mendalam, namun terlihat pantas untuk terus praktikkan. Sebagaimana dikatakan Borden, keutamaan tradisi jurnalisme adalah mengenai kedalaman yang membentuk tatanan yang baik.

Kritik Habermas dan Borden dapat menjadi landasan yang baik bagi praktik-praktik jurnalisme dalam operasi media massa sekarang dan akan datang. Bahwa independensi pada hakikatnya merupakan keutamaan. Dalam dunia kontemporer dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, jurnalisme butuh panduan, yang mengingatkannya terus menerus bahwa ia ada demi demokrasi dan perlu terus ada untuk merawat demokrasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Borden, Sandra L. *Journalism as Practice: Macintyre, Virtue Ethics and the Press*, 2013.
- Christians, Clifford G., John P. Ferré, and P. Mark Fackler. *Good News: Social Ethics and the Press*. 1993.
- Crook, Tim. "Ten Ways Journalism Industry Can Improve Self Regulation and Regain the Trust of the Public." *Press Gazette*. 2016.
- Dvorkin, Jeffrey. "Column: Why Click-Bait Will Be the Death of Journalism." (2016). <https://www.pbs.org/newshour/economy/what-you-dont-know-about-click-bait-journalism-could-kill-you>.
- Finlayson, James Gordon. *Habermas: A Very Short Introduction*: Oxford University Press, 2005. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780192840950.001.0001>.
- Habermas, Jürgen. "Media, Markets and Consumers: The Quality Press as the Backbone of the Political Public Sphere." In *Europe: The Faltering Project*. Cambridge: Polity Press, 2009.

- Habermas, Jürgen. "Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Have an Epistemic Dimension?" In *Europe: The Faltering Project*. Cambridge, UK: Polity Press, 2009.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated by Thomas Burger & Frederick Lawrance. Cambridge, USA: The MIT Press, 1989.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated by Thomas Burger & Frederick Lawrance. Cambridge, USA: The MIT Press, 1989a.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' Dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, Dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Koch, Gertrund. "Mass Culture and Cultural Criticism." In *The Habermas Handbook*, edited by Hauke Brunkhorst, Regina Kreide, and Cristina Lafont. New York: Columbia University Press, 2009.
- Kodoati, Michael Carlos. *Kritik Atas Media Massa: Menjadi Media Massa Demokratis Menurut Jürgen Habermas*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.
- Kodoati, Michael Carlos. "Kritik Jürgen Habermas Atas Media Massa: Prinsip, Debat, Dan Relevansi." Tesis Magister, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2022. <https://17813> ..., 2022.
- Kodoati, Michael Carlos, and Serepina Tiur Maida. "Defisit Kritis Media Massa: Menimbang Kebutuhan Akan Regulasi Diri Media Massa Berdasarkan Pemikiran Jürgen Habermas." *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah* 11, no. 1 (2023): 26-41.
- Menoh, Gusti A. B. *Agama Dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Merrill, John, Peter Gade, and Frederick Blevens. *Twilight of Press Freedom: The Rise of People's Journalism*. Mahwah, N.J.: Erlbaum, L, 2001. <http://site.ebrary.com/id/10258360>.
- Nichols, Tom. *The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why It Matters*. New York, N.Y: Oxford University Press, 2019.



University, Wester Michigan. "Biografi Sandra L. Borden." 2023.  
<https://wmich.edu/communication/directory/borden>.

Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

West, David. *Continental Philosophy: An Introduction*. Cambridge: Blackwell Publishers, 1996.